



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kulango, 11 April 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lakea II, 09 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer (Dinas PUPR Kabupaten Buol), pendidikan S1, tempat kediaman Lingkungan Kanal, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Buol. tertanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 298/06/XI2012, tertanggal 01 November 2012;

1 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 2 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir kali tinggal bersama di kos yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 11 tahun 1 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 13 Februari 2013, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan;
- b. Tergugat sering berkata kasar, menghina, dan mengusir Penggugat;
- c. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke kos di Lingkungan Kanal, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hanya sebatas untuk kepentingan anak, namun

2 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Peggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Wawan alias Wawan, S.Sos bin Hapid R. Polone** terhadap Peggugat **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA. Buol., tertanggal 01 Desember 2023, dan 11 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Peggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Peggugat tersebut yang pada pokoknya Peggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

3 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1.-----Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205064209880002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 21 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor Nomor 298/06/XI2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tertanggal 01 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II.-----

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Wawan, S.Sos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 2 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah

4 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



dan terakhir kali tinggal bersama di kos yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 13 Februari 2013, diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat sering berkata kasar, menghina, dan mengusir Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke kos di Lingkungan Kanal, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan sekarang;

- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Paramitha Ismanto binti Ismanto Djimat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Wawan, S.Sos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 2 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir kali tinggal bersama di kos yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 13 Februari 2013, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat sering berkata kasar, menghina, dan mengusir Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke kos di Lingkungan Kanal, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan

6 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal

7 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat sering berkata kasar, menghina, dan mengusir Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke kos di Lingkungan Kanal, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, dan **Paramitha Ismanto binti Ismanto Djimat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Maghfira, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 .berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 298/06/XI2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tertanggal 01 November 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat

8 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat sering berkata kasar, menghina, dan mengusir Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 ketika itu antara Penggugat dengan

9 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke kos di Lingkungan Kanal, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan sekarang, dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 13 Februari 2013, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat sering berkata kasar, menghina, dan mengusir Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke kos di Lingkungan Kanal, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

10 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, menghina, dan mengusir Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke kos di Lingkungan Kanal, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

11 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

12 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansyur, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I,
Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Sidang,

ttd

Mansyur, SHI.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB : Rp60.000,
 2. Biaya Proses : Rp80.000,
 3. Panggilan : Rp240.000,
 4. Materai : Rp10.000,
-
- Jumlah** : Rp390.000,-
(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Drs. Arifin

14 dari 14 hal. Put. No.170/Pdt.G/2023 /PA.Buol.

